

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat dan membangun dunia yang lebih baik pada abad ke-21. Melihat hasil pembangunan di beberapa negara yang belum mencapai target, maka MDGs ditransformasikan ke dalam Sustainable Development Goal (SDGs). terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.yaitu; (1) Target SDGs diperkirakan sampai dengan tahun 2030. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia dan juga pemerintah Indonesia. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai delapan buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender dan perempuan; (4)Menurunkan angka kematian anak; (4) Meningkatkan kesehatan ibu; (5) Memerangi penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; (6) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; (7) sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan (Bappenas, 2010: 2) . Permasalahannya apakah tujuan pembangunan ini akan terwujud di Indonesia dan mampu mencapai batas akhir untuk terwujudnya kesejahteraan sosial.

Namun demikian, fenomena yang sedang berlangsung bahwa kemiskinan tetap menjadi sebuah permasalahan yang kompleks di Indonesia, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat. Kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi masih perlu ditangani secara efektif, dari 33 provinsi, 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 16 provinsi lainnya masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (Bappenas, 2010:19). Kemudian sumber Bappenas (2010:25) menyatakan Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat lebih dari rata-rata nasional (13,33 persen), adalah Papua (36,80 persen), Papua Barat (34,88 persen) dan Maluku (27,74 persen). Di Pulau Sulawesi, provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo tercatat memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari tingkat nasional, begitu pula yang berlaku untuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Secara sosiologis masalah kemiskinan memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di antaranya adalah dengan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini diyakini dapat meningkatkan taraf hidup dan membutuhkan kemandirian masyarakat. Pada kenyataannya kondisi di tengah masyarakat, kemiskinan terus berlanjut karena tidak terciptanya kemandirian, kepercayaan, serta tidak terbinanya jaringan kerjasama dengan lingkungan sekitar.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya diarahkan kepada pengokohan kelembagaan masyarakat khususnya

kelompok-kelompok lokal yang menjadi potensi dasar yang ada di masyarakat dengan didukung oleh jaringan dan unsur kepercayaan yang tinggi di dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian pembangunan dapat bersinergis dengan program yang digulirkan pemerintah. Menurut Lawang (2002:63) pelaksanaan pembangunan yang meliputi segi kehidupan, baik politik, ekonomi dan sosial budaya akan berhasil apabila solidaritas sosial tetap terpelihara dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berbagai upaya mendorong masyarakat dari bawah menjadi kekuatan pembaharuan menuju keadaan dan kondisi yang lebih baik dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan melalui solidaritas sosial masyarakat yang baik. Nasution (2009:3) mengatakan salah satu bentuk solidaritas sosial yang ada pada masyarakat Indonesia adalah kerjasama gotong royong. Hal ini sebagai perilaku kehidupan dalam bentuk kerjasama antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dan membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.

Walaupun pelaksanaan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan yang digulirkan sebagai komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat melalui program IDT pada masa Orba kemudian pasca krisis ekonomi kembali pemerintah menggulirkan program seperti JPS, PPK, P2KP, BLT, Subsidi BBM dan raskin (Suparjan,tt:2) , namun komitmen ini tidak menjawab persoalan utama bagi pemenuhan hak-hak masyarakat miskin.

Menurut Edi Suharto (2009:15) terdapat beberapa kelemahan mendasar dengan program pengentasan kemiskinan yang hanya membangun citra bahwa konsep pengentasan kemiskinan itu berorientasi menjadi bantuan cuma-cuma dan hanya dimaknai secara parsial. Demikian pula menurut Faturochman (2007:5) bahwa program pengentasan ini berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan departemen yang bersangkutan tidak terintegrasi, parsial dan sektoral .

Berbagai program pemerintah dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan karena salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, keswadayaan (Suparjan,tt:2) .

Meskipun berbagai program pada masyarakat miskin digambarkan telah memenuhi target yang ingin dicapai dan sangat menggembirakan dikarenakan tingginya perhatian dari berbagai instansi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin ini. Namun dalam pelaksanaannya, upaya yang sangat mulia ini tidak selamanya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan. Ganjar Kurnia (2003:256) menyatakan adakalanya beberapa program diintroduksikan ke daerah yang sama sehingga selain aspek pemerataan tidak tercapai, pada tingkat tertentu bisa juga saling meniadakan.

Dengan demikian tampak bahwa program-program yang ada hanya bersifat insidental, sehingga kurang mampu memberdayakan masyarakat, serta dalam kenyataannya banyak program yang salah sasaran (Suparjan,tt:2).

Pemberdayaan masyarakat melalui program-program tampaknya belum dapat menghapuskan kemiskinan yang ada di masyarakat.

Seperti dikemukakan oleh Stamboel (2012:xi) gambaran umum keluarga miskin terlihat dengan kurang memiliki kesempatan kerja, terbatasnya kepemilikan aset produksi terutama modal, rendahnya kreativitas dan inovasi, tidak memiliki keterampilan atau kemampuan untuk berusaha, kurangnya akses ke lembaga keuangan, pendidikan, kesehatan serta pendapatan yang dihasilkan kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok

Masalah kemiskinan berkaitan dengan konsumsi, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketidakberdayaan masyarakat dianggap sebagai penyebab gagalnya program dalam menanggulangi kemiskinan, sehingga ketimpangan pembagian pendapatan yang terjadi tercermin dari adanya masyarakat miskin yang perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.

Kajian penelitian terdahulu tentang modal sosial dan pemberdayaan masyarakat yang melihat peran modal sosial dalam interaksi individu di dalam keluarga dan dalam kehidupan berorganisasi dilakukan oleh Prayitno (2004) dan Ibrahim (2002). Kemudian penelitian kemiskinan dari kelembagaan telah dibahas oleh Rivai (2008) ;Makmur (2002) ;Sanusi (2011) ; Fatem (2011); Darmawati, (2008) dan Indraddin (2012). Penelitian tentang institusi lokal dijadikan tempat berpijak pemberdayaan masyarakat miskin lokal sehingga pengorganisasian institusi diarahkan dalam memfasilitasi komunitas lokal oleh Lawang (2002); Budiyaniti (2008); Baddarudin (2006); Rahman (2007); Nasution (2009)

kemiskinan struktural dan kemiskinan stokastik oleh Samsubar dan Faturahman (2001). Pemanfaatan modal sosial yang ada di masyarakat rural maupun urban masih sebagai *bonding* (pengikat saja) belum sebagai jembatan (*bridging*) yang menghubungkan seluruh potensi warga sehingga kapasitas modal sosial belum secara optimal dimanfaatkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan oleh LPM Unpad (2008). Kemudian diteliti tentang *trust* oleh Rahardian (2011) bahwa hubungan bisnis yang kooperatif akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan komitmen sehingga *trust* berpengaruh positif. Integritas yang tinggi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepercayaan pelanggan oleh Ainurofia (2007). Penelitian tentang *link* oleh Fahmi (2010) mengidentifikasi hubungan patron dan klien oleh keluarga miskin nelayan bahwa *link* secara horisontal yang terbentuk berdasarkan status sosial yang relatif sama seperti nilai kekerabatan dan persahabatan kemudian secara vertikal bertumpu pada keluarga yang lebih mampu.

Para ahli sosial lain (Putnam,1993; Fukuyama,1993; Coleman ,1998) memberikan legitimasi keterlibatan dalam membangun komuniti ekonomi merasakan bahwa tingkat kepercayaan antar pribadi dan kapasitas organisasi menunjukkan adanya kesenjangan atau penurunan modal sosial akibat masalah ekonomi.

Berbagai uraian tentang hasil penelitian di atas membahas tentang modal sosial , tetapi penelitian yang dikaitkan dengan *link* dan *trust* masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu fokus penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan meneliti kontribusi

link dan *trust* yakni mengkaji dinamika kelompok lokal (kelompok pengajian, paguyuban, kelompok arisan dan asosiasi tertentu) yang ada dalam suatu komunitas, dengan menggunakan pendekatan partisipatoris, sehingga dapat lebih seksama melihat unsur *link* dan *trust* yang ada dalam masyarakat secara lebih mendalam. Peneliti berupaya memperluas pengetahuan tentang sebab-sebab, dampak, dan akibat *link* dan *trust* dengan melihat wilayah penelitian sebagai suatu bentuk kearifan lokal yang membangun dasar penyebab kemiskinan .

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan kemiskinan menjadi sangat unik karena pluralitas penduduk yang menjadikan perubahan dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin menjadi lamban. Keterbatasan peran dari pihak *stakeholder* mendorong gerakan bersama untuk bersinergis dalam bentuk keterlibatan partisipasi masyarakat tidak maksimal, dengan demikian perlu mengangkat peran *link* dan *trust* pada kelompok-kelompok lokal dengan institusi yang bertindak sebagai fasilitator program pengentasan kemiskinan untuk mencapai tujuan bersama dalam memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan *research questions* yaitu; Bagaimana *link* dan *trust* dapat berkontribusi dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin .

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, dan menganalisis *link* dan *trust* dalam upaya mengentaskan dan memberdayakan masyarakat miskin melalui kelompok lokal. Untuk selanjutnya diharapkan memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Sosiologi.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, baik akademik maupun praktis antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Aspek akademis ; memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi dalam bentuk konsep serta teori yang relevan tentang *link* dan *trust* dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis.
- 2) Aspek Praktis; memberikan pemahaman kondisi obyektif kelompok lokal yang dapat menciptakan suasana kerjasama untuk mendukung tujuan bersama dengan *link*, *trust*, dan partisipasi masyarakat, memberikan masukan kepada segenap pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan dan perumusan program-program yang berkaitan dengan pemanfaatan modal sosial bagi penanggulangan kemiskinan .

